



**GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 12 );
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.891.605.742.972,21
2. Pendapatan Transfer Pusat	
a. Pendapatan Dana Perimbangan	Rp 4.087.748.162.506,00
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 21.547.646.000,00
Lainnya	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp 9.078.040.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 10.009.979.591.478,20

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp	2.549.829.683.419,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.811.156.492.698,00
c. Belanja Bunga	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi	Rp	0,00
e. Belanja Hibah	Rp	390.363.362.858,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp	35.430.670.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	<u>5.786.780.208.975,00</u>

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp	16.531.477.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	421.123.195.861,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	391.132.240.152,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.195.568.098.007,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	57.537.651.640,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	<u>1.075.029.880,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	2.082.967.692.540,00

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	Rp	<u>249.778.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	249.778.000,00

4. Belanja Transfer

a. Belanja Transfer-Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota		
1. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota	Rp	2.083.597.551.764,00
b. Belanja Transfer-Bantuan Keuangan		
1. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	288.344.360.586,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Dacrah ke Desa	Rp	273.669.947.239,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	<u>2.645.611.859.589,00</u>
Total Belanja	Rp	10.515.609.539.104,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(505.629.947.625,79)

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Dacrah	Rp 574.741.312.692,41
2. Pengeluaran Daerah	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 574.741.312.692,41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 69.111.365.066,62

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
AN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19840326 200903 1 003

